

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI

NOMOR : 02/DAGLU/PER/6/2015

TENTANG

JENIS, BENTUK DAN TATA CARA PENGISIAN FORMULIR  
SURAT KETERANGAN ASAL (SKA) UNTUK BARANG ASAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (6) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22/M-DAG/PER/3/2015 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia, perlu mengatur mengenai jenis, bentuk dan tata cara pengisian formulir Surat Keterangan Asal (SKA) untuk Barang Asal Indonesia;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri tentang mengenai jenis, bentuk dan tata cara pengisian formulir Surat Keterangan Asal (SKA) untuk Barang Asal Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1971 tentang Penetapan Pejabat yang Berwenang Mengeluarkan Surat Keterangan Asal;
7. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan;
8. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/8/2012;
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M-DAG/PER/3/2012 tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor;
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77/M-DAG/PER/10/2014 tentang Ketentuan Asal Barang Indonesia (*Rules of Origin of Indonesia*);
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22/M-DAG/PER/3/2015 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan untuk Barang Asal Indonesia;
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32/M-DAG/PER/3/2015 tentang Penetapan Instansi Penandatangan Surat Keterangan Asal;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI TENTANG JENIS, BENTUK DAN TATA CARA PENGISIAN SURAT KETERANGAN ASAL (SKA) UNTUK BARANG ASAL INDONESIA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Ketentuan Asal Barang Indonesia (*Rules of Origin of Indonesia*) adalah Peraturan Perundangan dan ketentuan administratif yang bersifat umum yang diterapkan untuk menentukan asal barang Indonesia.
2. Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) yang selanjutnya disingkat SKA adalah dokumen yang membuktikan bahwa barang ekspor Indonesia telah memenuhi Ketentuan Asal Barang Indonesia (*Rules of Origin of Indonesia*).

3. Eksportir adalah orang perseorangan atau lembaga atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang melakukan ekspor.
4. Barang adalah barang mentah, barang setengah jadi, atau barang jadi.
5. Barang asal Indonesia (*Indonesia originating goods*) adalah Barang yang berasal dari Indonesia yang telah memenuhi Ketentuan Asal Barang Indonesia (*Rules of Origin of Indonesia*).
6. SKA Preferensi adalah SKA yang digunakan untuk memperoleh fasilitas pengurangan atau pembebasan tarif bea masuk di negara tujuan ekspor.
7. SKA Non Preferensi adalah SKA yang digunakan dengan tidak memperoleh fasilitas pengurangan atau pembebasan tarif bea masuk di negara tujuan ekspor.
8. Sistem elektronik SKA yang selanjutnya disebut e-SKA adalah sistem pengajuan permohonan dan penerbitan SKA secara elektronik.
9. Formulir SKA adalah daftar isian yang telah dibakukan dalam bentuk, ukuran, warna, dan jenis peruntukan serta isinya sesuai dengan perjanjian internasional yang telah disepakati, ditetapkan sepihak oleh suatu negara atau sekelompok negara tujuan ekspor, atau yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
10. Instansi Penerbit SKA yang selanjutnya disebut IPSKA adalah instansi/badan/lembaga yang ditetapkan oleh Menteri dan diberi kewenangan untuk menerbitkan SKA.
11. Pejabat Penandatangan SKA adalah pegawai tetap pada IPSKA yang telah ditetapkan oleh Menteri dan diberi kewenangan serta tanggung jawab untuk menandatangani SKA.
12. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan.

## Pasal 2

Eksportir yang telah mendapatkan Hak Akses sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22/M-DAG/PER/3/2015 dapat mengajukan permohonan penerbitan SKA kepada IPSKA dengan mengisi Formulir SKA melalui e-SKA.

Pasal 3

- (1) Jenis, bentuk dan tata cara pengisian Formulir SKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi SKA Preferensi dan SKA Non Preferensi sesuai ketentuan Peraturan Menteri dan ketentuan lain yang ditetapkan dan/atau perjanjian internasional yang disepakati.
- (2) SKA Preferensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat menggunakan Formulir SKA sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal ini
- (3) SKA Non Preferensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat menggunakan Formulir SKA sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 4

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2015.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Juni 2015

DIREKTUR JENDERAL  
PERDAGANGAN LUAR NEGERI,



**LAMPIRAN I**  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI  
NOMOR 02/DAGLU/PER/6/2015  
TENTANG  
JENIS, BENTUK DAN TATA CARA PENGISIAN FORMULIR  
SURAT KETERANGAN ASAL (SKA) UNTUK BARANG ASAL INDONESIA

**JENIS, BENTUK DAN TATA CARA PENGISIAN FORMULIR  
SURAT KETERANGAN ASAL (SKA) PREFERENSI**

**1. GENERALIZED SYSTEM OF PREFERENCES**  
*(Certificate of Origin Form "A")*

**A. JENIS DAN BENTUK**

**Negara Tujuan :**

1. Kanada
2. Jepang
3. Selandia Baru
4. Norwegia
5. Swiss ditambah Liechtenstein
6. Amerika Serikat
7. Rusia
8. Belarus
9. Turki
10. Uni Eropa (European Union) :  
Austria, Belgia, Bulgaria, Belanda, Cyprus, Ceko, Denmark, Estonia, Finlandia, Hongaria, Italia, Irlandia, Inggris, Jerman, Luksemburg, Latvia, Lithuania, Malta, Perancis, Polandia, Portugal, Rumania, Spanyol, Slovakia, Slovenia, Swedia dan Yunani.

**Mutu :**

Kertas tulis yang tidak mengandung Pulp mekanis, yang beratnya tidak kurang dari 25 Gram/M2.

**Ukuran :**

210 x 297 mm

**Warna Kertas dan Peruntukan Formulir SKA :**

- Hijau muda (lembar asli), untuk Importir (sebagai dokumen pengapalan/shipping document).
- Putih (lembar kedua), untuk Instansi Penerbit.
- Putih (lembar ketiga), untuk Eksportir.
- Putih (lembar keempat), untuk Kepabeanan di negara tujuan ekspor.
- Putih (lembar kelima), untuk arsip.

...

1. Goods consigned from (Exporter's business name, address, country)			Reference No <b>GENERALIZED SYSTEM OF PREFERENCES</b> <b>CERTIFICATE OF ORIGIN</b> <b>(Combined declaration and certificate)</b> <b>FORM A</b> Issued in _____ (country) See notes overleaf		
2. Goods consigned to [Consignee's name, address, country]					
3. Means of transport and route (as far as known)			4. For official use		
5. Item number	6. Marks and numbers of packages	7. Number and kind of packages, description of goods		8. Origin criterion (see Notes overleaf)	9. Gross weight or other quantity
11. Certification			<b>12. Declaration by the exporter</b> It is hereby certified, on the basis of control carried out, that the declaration by the exporter is correct.  The undersigned hereby declares that the above details and statements are correct; that all the goods were produced in _____ (country) and that they comply with the origin requirements specified for those goods in the Generalized System of Preferences for goods exported to _____ (importing country) Place and date, signature and stamp of certifying authority _____ Place and date, signature of authorized signatory _____		

## NOTES (2007)

### I. Countries which accept Form A for the purposes of the generalized system of preferences (GSP):

	European Union:			
Australia*	Austria	Finland	Netherlands	
Belarus	Belgium	France	Poland	
Canada	Bulgaria	Hungary	Portugal	
Japan	Cyprus	Ireland	Romania	
New Zealand**	Czech Republic	Italy	Slovakia	
Norway	Denmark	Latvia	Slovenia	
Russian Federation	Estonia	Lithuania	Spain	
Switzerland including Liechtenstein***	Germany	Luxembourg	Sweden	
Turkey	Greece	Malta	United Kingdom	
United States of America****				

*Full details of the conditions covering admission to the GSP in these countries are obtainable from the designated authorities in the exporting preference-receiving countries or from the customs authorities of the preference-giving countries listed above. An information note is also obtainable from the UNCTAD secretariat.*

### II. General conditions

To qualify for preference, products must:

- (a) fall within a description of products eligible for preference in the country of destination. The description entered on the form must be sufficiently detailed to enable the products to be identified by the customs officer examining them;
- (b) comply with the rules of origin of the country of destination. Each article in a consignment must qualify separately in its own right; and,
- (c) comply with the consignment conditions specified by the country of destination. In general, products must be consigned direct from the country of exportation to the country of destination but most preference-giving countries accept passage through intermediate countries subject to certain conditions. (For Australia, direct consignment is not necessary).

### III. Entries to be made in Box 8

Preference products must either be wholly obtained in accordance with the rules of the country of destination or sufficiently worked or processed to fulfil the requirements of that country's origin rules.

(a) Products wholly obtained: for export to all countries listed in Section I, enter the letter "P" in Box 8 (for Australia and New Zealand Box 8 may be left blank).

(b) Products sufficiently worked or processed: for export to the countries specified below, the entry in Box 8 should be as follows:

- (1) United States of America: for single country shipments, enter the letter "Y" in Box 8; for shipments from recognized associations of countries, enter the letter "Z", followed by the sum of the cost or value of the domestic materials and the direct cost of processing, expressed as a percentage of the ex-factory price of the exported products; (example "Y" 35% or "Z" 35%).
- (2) Canada: for products which meet origin criteria from working or processing in more than one eligible least developed country, enter letter "G" in Box 8; otherwise "F".
- (3) The European Union, Japan, Norway, Switzerland including Liechtenstein, and Turkey: enter the letter "W" in Box 8 followed by the Harmonized Commodity Description and Coding System (Harmonized System) heading at the 4-digit level of the exported product (example "W" 96.18).
- (4) Russian Federation: for products which include value added in the exporting preference-receiving country, enter the letter "Y" in Box 8 followed by the value of imported materials and components expressed as a percentage of the fob price of the exported products (example "Y" 45%); for products obtained in a preference-receiving country and worked or processed in one or more other such countries, enter "Pk".
- (5) Australia and New Zealand: completion of Box 8 is not required. It is sufficient that a declaration be properly made in Box 12.

\* For Australia, the main requirement is the exporter's declaration on the normal commercial invoice. Form A, accompanied by the normal commercial invoice, is an acceptable alternative, but official certification is not required.

\*\* Official certification is not required.

\*\*\* The Principality of Liechtenstein forms, pursuant to the Treaty of 29 March 1923, a customs union with Switzerland.

\*\*\*\* The United States does not require GSP Form A. A declaration setting forth all pertinent detailed information concerning the production or manufacture of the merchandise is considered sufficient only if requested by the district collector of Customs.

Dalam rangka memanfaatkan "ASEAN Cummulation" GSP Jepang,  
SKA Form A perlu dilengkapi dengan :

***Certificate of Cumulative  
Working/Processing. Ref. No.***

Diisi dengan nomor dan kode Instansi Penerbit.

**(Ref. No. of Certificate of Origin .....**

Diisi dengan nomor SKA Form A sebagai sertifikat induk.

**Issued in : ..... (country)**

Diisi dengan INDONESIA.

***Products (Materials) Producing Country.***

Diisi dengan nama negara anggota ASEAN sebagai produsen yang merupakan negara asal bahan baku/penolong tersebut yang digunakan dalam proses produksi.

***Description :***

Diisi dengan uraian bahan baku/ penolong yang diimpor dari negara anggota ASEAN tersebut

***Quantity :***

Diisi dengan jumlah bahan baku/penolong yang diimpor dari negara anggota ASEAN tersebut.

***Value :***

Diisi dengan nilai bahan baku/penolong yang diimpor dari negara anggota ASEAN tersebut.

***Products Producing country :***

Diisi dengan INDONESIA

***Description :***

Diisi dengan uraian barang yang dieksport secara jelas.

***Quantity :***

Diisi dengan jumlah barang.

***Value :***

Diisi dengan nilai barang.

**Certificate of Cumulative Working / Processing**

Annex to Certificate of Origin	Ref. No. _____						
<b>Cumulative Working / Processing Certificate</b>							
(Ref. No. of Certificate of Origin _____)							
Issued in _____ (country)							
Products (Materials)				Products			
Producing country	Description	Quantity	Value	Producing country	Description	Quantity	Value
Certification				Declaration by the exporter			
It is hereby certificated, on the basis of control Carried out, that the declaration by the exporter is correct.				The undersigned hereby declares that the above details are correct.			
Place and date, signature and stamp of certifying authority				Place and date, signature authorized signatory			

APPLICATION FOR CERTIFICATE OF ORIGIN  
FORM B

The undersigned, being the exporter of the goods described overleaf, DECLARES that these goods were produced in ..... (country)  
SPECIFIES as follows the grounds on which the goods are claimed to comply with GSP origin requirements<sup>1)</sup>

SUBMITS the following supporting documents<sup>2)</sup>:

UNDERTAKES to submit, at the request of the appropriate authorities of the exporting country, any additional supporting evidence which these authorities may require for the purpose of issuing a certificate of origin, and undertakes, if required, to agree to any inspection of his accounts and any check on the processes of manufacture of the above goods, carried out by the said authorities.

REQUESTS the issue of a certificate of origin for these goods.

Place and date .....

(Signature of authorized signatory)

<sup>1)</sup> To be completed if materials or components originating in another country have been used in the manufacture of the goods in question. Indicate the materials or components used, their Harmonized System heading, their country of origin and, where appropriate, the manufacturing processes qualifying the goods as originating in the country of manufacture (application of the list of working or processing operations), the goods produced and their Harmonized System heading. Where the origin criteria involve a percentage value, give information enabling this percentage to be verified -- for example the value of imported materials and components and those of undetermined origin and the ex-factory price of the exported goods, where applicable.

<sup>2)</sup> For example, import documents, invoices, etc., relating to the materials or components used.

NOTES

- A. **Procedure for claiming preference.** A declaration on the certificate of origin form must be prepared by the exporter of the goods and submitted in duplicate, together with a GSP application form, to the certifying authority of the country of exportation which will, if satisfied, certify the top copy of the certificate of origin and return it to the exporter for transmission to the importer in the country of destination. The certifying authority will at the same time return to the exporter, for his retention, the duplicate copy of the certificate of origin, but will itself retain the GSP application form duly completed and signed by the exporter.
- B. **Sanctions.** Persons who furnish, or cause to be furnished, information which relates to origin or consignment, and which is untrue in a material particular, are liable to legal penalties and to the suspension of facilities for their goods to obtain preference.

2.

**ASEAN TRADE IN GOODS AGREEMENT**

*(Certificate of Origin "Form D")*

**A. JENIS DAN BENTUK**

**Negara Tujuan:**

Seluruh negara anggota ASEAN

**Ukuran:**

Standar ISO A4

**Warna Kertas dan Peruntukan Formulir SKA:**

- Lembar asli (*original*), untuk Importir (*Customs Authority*)
- Lembar kedua (*duplicate*), untuk Instansi Penerbit
- Lembar ketiga (*triplicate*), untuk Eksportir

\*\*\*

1. Goods consigned from (Exporter's business name, address, country)		Reference No. <b>ASEAN TRADE IN GOODS AGREEMENT/ ASEAN INDUSTRIAL COOPERATION SCHEME CERTIFICATE OF ORIGIN</b> (Combined Declaration and Certificate) <b>FORM D</b> Issued in _____ (Country) See Overleaf Notes			
2. Goods consigned to (Consignee's name, address, country)		4. For Official Use <input type="checkbox"/> Preferential Treatment Given Under ASEAN Trade in Goods Agreement <input type="checkbox"/> Preferential Treatment Given Under ASEAN Industrial Cooperation Scheme <input type="checkbox"/> Preferential Treatment Not Given (Please state reason/s)			
3. Means of transport and route (as far as known)  Departure date  Vessel's name/Aircraft etc		..... Signature of Authorised Signatory of the Importing Country			
Port of Discharge					
5. Item number	6. Marks and numbers on packages	7. Number and type of packages, description of goods (including quantity where appropriate and HS number of the importing country)	8. Origin criterion (see Overleaf Notes)	9. Gross weight or other quantity and value (FOB) where RVC is applied	10. Number and date of invoices
11. Declaration by the exporter The undersigned hereby declares that the above details and statement are correct; that all the goods were produced in		..... (Country)  and that they comply with the origin requirements specified for these goods in the ASEAN Trade in Goods Agreement for the goods exported to  ..... (Importing Country)			
..... Place and date, signature of authorised signatory					
13	<input checked="" type="checkbox"/> Third Country <input type="checkbox"/> Exhibition <input type="checkbox"/> De Minimis Back-to-Back	<input type="checkbox"/> Invoicing Accumulation <input type="checkbox"/> Issued Retrospectively <input type="checkbox"/> CO Partial Cumulation	..... Place and date, signature and stamp of certifying authority		

## OVERLEAF NOTES

1. Member States which accept this form for the purpose of preferential tariff under the Trade in Goods Agreement (ATIGA) or the ASEAN Industrial Cooperation (AICO) Scheme:
 

BRUNEI DARUSSALAM LAOS PDR	CAMBODIA MALAYSIA	INDONESIA MYANMAR
PHILIPPINES VIETNAM	SINGAPORE	THAILAND
2. **CONDITIONS:** The main conditions for admission to the preferential treatment under the ATIGA or the AICO Scheme are that goods sent to any Member States listed above must:
  - (i) fall within a description of products eligible for concessions in the country of destination;
  - (ii) comply with the consignment conditions in accordance with Article 32 (Direct Consignment) of Chapter 3 of the ATIGA; and
  - (iii) comply with the origin criteria set out in Chapter 3 of the ATIGA.
3. **ORIGIN CRITERIA:** For goods that meet the origin criteria, the exporter and/or producer must indicate in Box 8 of this Form, the origin criteria met, in the manner shown in the following table:
 

Circumstances of production or manufacture in the first country named in Box 11 of this form	Insert in Box 8
(a) Goods wholly obtained or produced in the exporting Member State satisfying Article 27 (Wholly Obtained) of the ATIGA	"WO"
(b) Goods satisfying Article 28 (Non-wholly obtained) of the ATIGA <ul style="list-style-type: none"> <li>• Regional Value Content</li> <li>• Change in Tariff Classification</li> <li>• Specific Processes</li> </ul>	Percentage of Regional Value Content, example "40%"  The actual CTC rule, example "CC" or "CTH" or "CTSH"  "SP"
(c) Goods satisfying paragraph 2 of Article 30 (Partial Cumulation) of the ATIGA	"PC x%", where x would be the percentage of ARegional Value
4. **EACH ARTICLE MUST QUALIFY:** It should be noted that all the goods in a consignment must qualify separately in their own right. This is of particular relevance when similar articles of different sizes or spare parts are sent.
5. **DESCRIPTION OF PRODUCTS:** The description of products must be sufficiently detailed to enable the products to be identified by the Customs Officers examining them. Name of manufacturer, any trade mark shall also be specified.
6. **HARMONISED SYSTEM NUMBER:** The Harmonised System number shall be that of in ASEAN Harmonised Tariff Nomenclature (HTSN) Code of the importing Member State.
7. **EXPORTER:** The term "Exporter" in Box 11 may include the manufacturer or the producer.
8. **FOR OFFICIAL USE:** The Customs Authority of the importing Member State must indicate (■) in the relevant boxes in column 4 whether or not preferential treatment is accorded.
9. **MULTIPLE ITEMS:** For multiple items declared in the same Form D, if preferential treatment is not granted to any of the items, this is also to be indicated accordingly in box 4 and the item number circled or marked appropriately in box 5.
10. **THIRD COUNTRY INVOICING:** In cases where invoices are issued by a third country, "the

"Third Country Invoicing" box should be ticked (✓) and such information as name and country of the company issuing the invoice shall be indicated in box 7.

11. **BACK-TO-BACK CERTIFICATE OF ORIGIN:** In cases of Back-to-Back CO, in accordance with Rule 11 (Back to back CO) of Annex 8 of the ATIGA, the "Back-to-Back CO" box should be ticked (✓).
12. **EXHIBITIONS:** In cases where goods are sent from the exporting Member State for exhibition in another country and sold during or after the exhibition for importation into a Member State, in accordance with Rule 22 of Annex 8 of the ATIGA, the "Exhibitions" box should be ticked (✓) and the name and address of the exhibition indicated in box 2.
13. **ISSUED RETROACTIVELY:** In exceptional cases, due to involuntary errors or omissions or other valid causes, the Certificate of Origin (Form D) may be issued retroactively, in accordance with paragraph 2 of Article 10 of Annex 8 of the ATIGA, the "Issued Retroactively" box should be ticked (✓).
14. **ACCUMULATION:** In cases where originating in a Member State are used in another Member State as materials for finished goods, in accordance with paragraph 1 of Article 30 of the ATIGA, the "Accumulation" box should be ticked (✓).
15. **PARTIAL CUMULATION (PC):** If the Regional Value Content of material is less than forty percent (40%), the Certificate of Origin (Form D) may be issued for cumulation purposes, in accordance with paragraph 2 of Article 30 of the ATIGA, the "Partial Cumulation" box should be ticked (✓).
16. **DE MINIMIS:** If a good that does not undergo the required change in tariff classification does not exceed ten percent (10%) of the FOB value, in accordance with Article 33 of the ATIGA, the "De Minimis" box should be ticked (✓).

3. ***CERTIFICATE IN REGARD TO TRADITIONAL HANDICRAFT BATIK  
FABRICS OF COTTON***

A. **JENIS DAN BENTUK**

**Negara Tujuan :**

Jepang

**Mutu :**

Kertas tulis yang tidak mengandung Pulp mekanis, yang beratnya tidak kurang dari 25 Gram/M2.

**Ukuran :**

210 x 297 mm

**Warna Kertas dan Peruntukan Formulir SKA :**

- Merah muda (lembar asli), untuk Importir
- Kuning muda (lembar kedua), untuk Instansi Penerbit.
- Kuning muda (lembar ketiga), untuk Eksportir
- Hijau muda (lembar keempat), untuk Kepabeanan di negara tujuan ekspor

\*\*\*

1 Exporter (Name, full address, country)	2 Number		
<b>CERTIFICATE in regard to TRADITIONAL HANDICRAFT BATIK FABRICS OF COTTON</b> issued with a view to obtaining the benefit of the preferential tariff regime in Japan.			
3 Consignee (Name, full address, country)	4 Country of origin	5 Country of destination	
6 Place and date of shipment — means of transport	7 Supplementary details		
8 Marks and numbers — Number and kind of packages — DETAILED DESCRIPTION OF GOODS		9 Quantity (?)	10 FOB value (?)
<b>11 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY</b> I, the undersigned, certify that the consignment described above contains only batik fabric of cotton, hand dyed and hand printed using wax drawing method, of the cottage industry of the country shown in box No. 4.			
12 Competent authority (Name, full address, country)	At ..... ON ....., (Signature) (Seal)		

<sup>(1)</sup> Indicate whether in pieces, metres, square metres or kilograms.  
<sup>(2)</sup> In the currency of the country of sale.

SERIAL

**4. CERTIFICATE IN REGARD TO CERTAIN HANDICRAFT PRODUCTS**

**A. JENIS DAN BENTUK**

**Negara Tujuan :**

Uni Eropa

**Mutu :**

Kertas tulis yang tidak mengandung Pulp mekanis, yang beratnya tidak kurang dari 80 Gram/M2 (original) dan tidak kurang dari 60 Gram/M2 (copy).

**Ukuran :**

HVO Kwarto

**Warna Kertas dan Peruntukan Formulir SKA :**

- Putih (lembar asli), untuk Importir (sebagai dokumen pengapalan/  
shipping document).
- Putih (lembar kedua), untuk Instansi Penerbit.
- Putih (lembar ketiga), untuk Eksportir
- Putih (lembar keempat), untuk Kepabeanan di negara tujuan ekspor

\*\*\*

1 Exporter (Name, full address, country)	2 Number		
3 Consignee (Name, full address, country)	<p style="text-align: center;"><b>CERTIFICATE RELATING TO SILK OR COTTON HANDLOOM PRODUCTS</b></p> <p style="text-align: center;">Issued with a view to obtaining the benefit of the preferential tariff regime in the European Economic Community</p>		
	4 Country of manufacture	5 Country of destination	
6 Place and date of shipment — Means of transport	7 Supplementary details		
8 DETAILED DESCRIPTION OF GOODS — Marks and numbers — Number and kind of packages	9 Quantity (*)	10 FOB value (*)	
<b>11 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY</b> I, the undersigned, certify that: <ul style="list-style-type: none"> <li>— the consignment described above contains only handloom textile products of the cottage industry of the country shown in box No 4,</li> <li>— to each piece is attached:               <ul style="list-style-type: none"> <li>— at the beginning and end, an approved stamp (*),</li> <li>— a seal No ..... (*)</li> </ul> </li> </ul>			
12 Competent authority (Name, full address, country)	At ..... On ..... (Signature) (Seal)		

(\*) State whether in pieces, mallets, square mats or otherwise.  
 (\*\*) The currency of the contract of sale.  
 (\*\*) Details as appropriate.

## B. KETENTUAN PENERBITAN

Digunakan untuk ekspor barang-barang kerajinan tangan Non tekstil yang ditujukan ke negara-negara anggota Uni Eropa yang tercakup dalam cakupan skema barang kerajinan ME, untuk mendapatkan pembebasan bea masuk.

Diberlakukan bagi barang-barang hasil kerajinan tangan dan merupakan hasil industri pedesaan.

C. TATA CARA PENGISIAN	
Kolom ("Box")	Substansi yang Dicantumkan
1	Nama, alamat lengkap dan negara Eksportir.
2	Nomor urut penerbitan SKA, diikuti dengan kode Instansi Penerbit SKA.
3	Nama, alamat lengkap dan negara Importir
4	INDONESIA
5	Negara tujuan (negara anggota UE)
6	Tempat dan tanggal pengapalan serta alat angkut yang digunakan.
7	Catatan Pejabat Instansi Penerbit.
8	Uraian barang secara jelas, tanda dan nomor serta jumlah dan jenis kemasan.
9	Jumlah barang dalam satuan Pieces, Meter, Square meter atau Kgs.
10	Nilai (FOB US. \$) sesuai dengan kontrak penjualan.
11	Tempat dan tanggal penerbitan serta tanda tangan Pejabat yang berwenang menandatangani SKA dan stempel khusus SKA dari Instansi Penerbit.
12	Nama Pejabat yang menandatangani SKA serta nama, alamat lengkap dan negara Instansi Penerbit.

**5. CERTIFICATE RELATING TO SILK COTTON HANDLOOMS PRODUCTS**

**A. JENIS DAN BENTUK**

**Negara Tujuan :**

Uni Eropa

**Mutu :**

Kertas tulis yang tidak mengandung Pulp mekanis, yang beratnya tidak kurang dari 25 Gram/M2.

**Ukuran :**

210 x 297 mm

**Warna Kertas dan Peruntukan Formulir SKA :**

- Ungu muda (lembar asli), untuk Importir
- Jingga (lembar kedua), untuk Instansi Penerbit.
- Jingga (lembar ketiga), untuk Kepabeanan di negara tujuan ekspor
- Jingga (lembar keempat), untuk Eksporir

\*\*\*



## B. KETENTUAN PENERBITAN

Digunakan untuk ekspor barang kerajinan tangan TPT yang terbuat dari bahan sutera atau kapas ke Uni Eropa untuk mendapatkan pembebasan bea masuk yang terdapat dalam cakupan skema barang-barang kerajinan ME. Diberlakukan bagi barang-barang kerajinan TPT yang dikerjakan dengan Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM) atau tangan terbuat dari bahan baku sutera, atau kapas dan merupakan industri pedesaan.

## C. TATA CARA PENGISIAN

Kolom ("Box")	Substansi yang Dicantumkan
1	Nama, alamat lengkap dan negara Eksportir.
2	Nomor urut penerbitan SKA, diikuti dengan kode Instansi Penerbit SKA.
3	Nama, alamat lengkap dan negara Importir.
4	INDONESIA
5	Negara tujuan (negara anggota UE)
6	Tempat dan tanggal pengapalan serta alat angkut yang digunakan.
7	Catatan Pejabat Instansi Penerbit
8	Uraian barang secara jelas, tanda dan nomor serta jumlah dan jenis kemasan.
9	Jumlah barang dalam satuan Pieces, Meter, Square meter atau Kgs.
10	Nilai (FOB US. \$) sesuai dengan kontrak penjualan.
11	Tempat dan tanggal penerbitan serta tanda tangan Pejabat yang berwenang menandatangani SKA dan stempel khusus SKA dari Instansi Penerbit.
12	Nama Pejabat yang menandatangani SKA serta nama, alamat lengkap dan negara Instansi Penerbit.

**A. JENIS DAN BENTUK****Negara Tujuan :**

Australia

**Mutu :**

Kertas tulis yang tidak mengandung Pulp mekanis, yang beratnya tidak kurang dari 25 Gram/M2.

**Ukuran :**

210 x 297 mm

**Warna Kertas dan Peruntukan Formulir SKA :**

- Merah muda (lembar asli), untuk Importir
- Kuning muda (lembar kedua), untuk Instansi penerbit.
- Kuning muda (lembar ketiga), untuk Eksportir
- Hijau muda (lembar keempat), untuk Kepabeanan di negara tujuan ekspor

# Industrial Crafts Certification

(as required by the Australian Customs Service Legislation)

Reference No.

Reference No.	House of Manufacture
Address of Manufacture	
Indicates the date of manufacture and the following statement is made:	

## THE TABLE

Quantity	Article/Craft No.	Description of Goods	Unit Value

### A. The goods are:

Specified below or by the authority of the Certifying Authority or by a duly authorized Person, hereinafter referred to as "the Certifying Authority".

or

articles of apparel, or of the same, which are made of silk or silk, and the value of which is not less than £100/- (£100.00) per article.

or

hand woven, machine woven or dyed, woven and woven fabrics, provided that they are:

(a) the handwoven fabrics

(b) the machine woven fabrics

(c) the woven and woven fabrics

(d) the woven and woven fabrics

or

specifications of which are contained in the Schedule hereto.

AND

### B. The goods are to be made of the following materials and/or articles:

(a) the handwoven

(b) the machine woven

(c) the woven and woven fabrics

I hereby declare that the  
above details are correct.

Signature of Manufacturer

I hereby certify that the goods described in the Table above are Industrial Crafts.

Name of Certifying Authority

Signature of Certifying Officer

## B. KETENTUAN PENERBITAN

Digunakan untuk ekspor barang yang termasuk "Industrial Craft Merchandise" tujuan Australia.

Diberlakukan bagi ekspor *Textile, Clothing dan Footwear (TCF)* ke Australia berdasarkan *TCF Handicraft Scheme Australia* yang dibagi dalam dua ketentuan, yaitu :

1. *Industrial Craft Merchandise* yang ditetapkan dengan sistem kuota.
  - (i) Produk yang dibuat dengan mempergunakan tangan, dengan alat yang digerakan oleh tangan maupun kaki/perkakas tenun (*non mechanical, non powered tools*);
  - (ii) Produknya terdiri dari 90% serat alam (natural fibres) atau bahan bakunya dari kain (*fabrics*) yang prosesnya dicetak, dicelup sesuai dengan sistem yang berlaku pada pembuatan batik;
  - (iii) Produk yang bahan bakunya sebagian atau sebagian besar tersedia dari hasil alam;

2. *Genuine Handicraft Merchandise* yang dikenakan bebas bea masuk (*duty free*).

Yang termasuk dalam *TCF Genuine Handicraft*, kategorinya sama dengan *Industrial Craft Merchandise* tetapi prosesnya dikerjakan atau dijahit dengan tangan dari bahan 90% wool atau 90% kapas atau campuran ramie (*ramie mixtures*) :

Produk-produk *Genuine Handicraft* yang tidak dikenakan *import duty* misalnya :

- (i) 90% wool *needle knit jumpers*;
- (ii) 90% kapas/ramie mixture *hand crochet tops*;
- (iii) *Hand sewn and hand finished blouse from 90% natural fibre handloomed fabrics*.

\*\*\*